

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2018–2021 masih stabil. Hasil rasio tahun 2018 sekitar 70%, sedangkan hasil rasio tahun 2019, 2020, dan 2021 masing-masing sekitar 66,94%, 73,36%, dan 63,45%. Terlihat rasio penguasaan pemerintah daerah terhadap perekonomian menunjukkan pola distributif. Hal ini menandakan peran pemerintah pusat dalam perekonomian semakin mengecil, dan pemerintah provinsi DKI Jakarta diyakini mampu mengelola perekonomian daerah dan menentukan potensi daerahnya.
2. Rasio Efektivitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dikatakan sangat efektif untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 karena hasil evaluasi memenuhi syarat efektivitas. Satu-satunya pengecualian adalah tahun 2019, ketika tujuan pencapaian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak tercapai. Rasio efektivitasnya berkisar 97,69% efektif pada tahun 2018, 70,89,89% efektif pada tahun 2019, 98,23%

efektif pada tahun 2020, dan 92,08% efektif pada tahun 2021 berdasarkan temuan penelitian.

3. Rasio Efisiensi (Efisiensi Penggunaan Energi) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengidentifikasi hasil yang tidak efisien pada tahun 2018 hingga 2021 disebabkan oleh tingkat belanja atau pengeluaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pendapatan atau belanja daerah, dengan tingkat efisiensi sebesar 100,28 persen pada tahun 2018, 104,23 persen pada tahun 2019, 93,2% pada tahun 2020, dan 93,97 persen pada tahun 2021. Angka-angka tersebut untuk tahun 2018 hingga tahun 2021.
4. Berdasarkan pendanaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat Indonesia, tingkat ketergantungan tahunan berkisar antara 29% hingga 15%, 23% hingga 35%, 30% hingga 35%, dan 34,58% berturut-turut untuk tahun 2018 hingga 2021.
5. Temuan Rasio Keserasian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2018–2021 menunjukkan bahwa rasio belanja operasi lebih besar dibandingkan rasio belanja modal, sehingga menunjukkan bahwa lebih banyak uang yang dialokasikan untuk operasional pemerintahan sehari-hari dibandingkan untuk pembangunan. dari seluruh area. Rasio hasil keserasian belanja operasi pada tahun 2018 sebesar 76,87%, tahun 2019 sebesar 81,97%, tahun 2020 sebesar 84,76%, dan tahun 2021 sebesar 87,86%.

6. Rasio Pertumbuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2018-2021 terbagi menjadi empat bagian yaitu sebagai berikut:
- a. Laju kenaikan PAD Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2018 akan signifikan yaitu sebesar 1,3%; signifikan pada tahun 2019, sebesar 5,4%; signifikan pada tahun 2020 sebesar 18,14%; dan signifikan pada tahun 2021, sebesar 11,2%.
 - b. Laju kenaikan pendapatan pemerintah DKI Jakarta pada tahun 2018 sebesar 5,53%, tahun 2019 sebesar 1,7%, tahun 2020 sebesar 10,29 persen, dan tahun 2021 sebesar 17,32 persen.
 - c. Persentase kenaikan tahunan anggaran operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 sebesar 18,36%, pada tahun 2019 sebesar 11,93%, pada tahun 2020 sebesar (16,57%), dan pada tahun 2021 sebesar 22,73%.
 - d. Persentase kenaikan tahunan anggaran belanja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 sebesar 27,81%, pada tahun 2019 sebesar (18,17), pada tahun 2020 sebesar (72,53%), dan pada tahun 2021 sebesar 116,36%.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mewujudkan potensi daerah peruntukannya secara maksimal, maka kemandirannya harus diperkuat atau bahkan ditingkatkan dalam pelaksanaan otonomi.
2. Untuk memberlakukan PAD, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) perlu memperkuat atau bahkan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun dana. Sebab, bisa dikatakan upaya ini tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan bagi kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun dana.
3. Dalam penggunaan uang tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus berupaya semaksimal mungkin untuk menjamin bahwa jumlah pengeluaran atau pinjaman tidak melebihi jumlah keseluruhan keuntungan atau pembayaran yang telah diterima.
4. Provinsi perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang meliputi pajak, retribusi, dan hasil kekayaan pengelolaan, agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak terus menerus berkonflik dengan manfaat yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

5. Pengeluaran belanja operasi, yang berupa pengeluaran rutin untuk kegiatan-kegiatan, perlu ditingkatkan agar prasarana yang ada di Provinsi DKI Jakarta lebih menonjol.
6. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menemukan cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan serta sektor belanja yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal.
7. Penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut agar dapat lebih memahami dan memasukkan referensi-referensi terkait mata uang daerah yang akan digunakan untuk memodifikasi mata uang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar dapat memberikan hasil yang lebih akurat. Dia ingin mencapai tujuan ini untuk memenuhi tujuan ini.